

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
4	KOMPAS	19	15-8-'02

Masih Ditahan, Tujuh Kapal Keruk Asing

PEKANBARU, KOMPAS — Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Djoko Sumaryono menegaskan, tujuh kapal keruk asing yang ditangkap patroli TNI Angkatan Laut karena diduga mencuri pasir laut, pekan terakhir Juli lalu, sampai saat ini masih ditahan dan berada dalam pengawasan. TNI AL pun telah menyelesaikan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.

"Sebagai panglima komando operasi keamanan laut wilayah barat, saya tegaskan, tidak ada kapal pengeruk pasir yang dilepas atau melarikan diri. Ketujuh kapal itu masih tetap dalam pengawasan TNI AL, dalam hal ini aparat keamanan laut di daerah," kata Djoko Sumaryono pada wartawan di Bandung, Rabu (14/8).

Tujuh kapal keruk asing, masing-masing Vasco da Gama, Profesor Gorjunof, Samsung Apollo, Lange Wafer, Alexander von Humboldt, TB Jasmine, dan TB Olivia, ditangkap dalam perjalanan menuju Singapura. Saat ini ketujuh kapal itu masih ditahan di tiga tempat, yaitu dua kapal di perairan Tanjung Uban, Bintan, dua di Pangkalan TNI AL Batam, dan tiga sisanya di perairan Tanjung Uban.

Di antara kesalahan kapal-kapal itu adalah tidak membawa dokumen asli bagi beroperasinya sebuah kapal, di samping tidak memiliki berbagai izin termasuk izin berlayar maupun ekspor, dan tidak memiliki berbagai alat seperti alat pantau kapal.

Penangkapan kapal keruk berbendera asing itu menjadi perhatian, karena baru pertama kali penangkapan kapal asing yang berkaitan dengan penambangan pasir di Riau di-

lakukan secara serempak dalam jumlah cukup besar. TNI-AL menjelaskan kepada DPRD Riau Senin lalu untuk membuktikan bahwa mereka serius menangani masalah tersebut.

Mencuri pasir

Kepala Sub Dinas Pengawasan Dinas Pertambangan Riau, Jalius, kemarin di Pekanbaru menyatakan, ketujuh kapal keruk asing itu masih dalam penyelidikan Tim Pengendalian Pengawasan Pengusahaan Laut Pusat. Saat ini tim telah menerima berkas hasil pemeriksaan aparat TNI AL dan akan ditindaklanjuti.

Jalius mengatakan, pihaknya belum memastikan tingkat kesalahan kapal-kapal tersebut. "Tetapi jelas tidak akan didiamkan karena berkaitan dengan persoalan ekonomi lintas negara dan lingkungan hidup, sekaligus berkaitan dengan masa depan masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Pertambangan Riau Badrun A Saleh menjelaskan, instansinya hanya menyangkut suatu pertambangan di daerah. Itu pun terbatas pada kawasan 4-12 mil dari pantai, sedangkan kawasan 0-4 mil dari pantai merupakan wewenang kabupaten/kota. Kapal-

kapal itu diduga mencuri pasir dalam wilayah wewenang Kabupaten Karimun. "Jadi, kaitannya dengan kami sedikit sekali," ujarnya.

Menanggapi kabar yang beredar bahwa kapal-kapal keruk asing dilepas dengan denda 15 juta dollar AS, Badrun mengaku bingung. "Saya bingung juga karena khabar itu disiarkan lewat koran dan televisi, padahal waktu itu kami baru hendak membahas materi penangkapan kapal-kapal tersebut," ungkap Badrun.

Banyak dimensi

Jalius mengatakan, penangkapan ketujuh kapal keruk asing itu memiliki berbagai dimensi. Berkaitan dengan status pemilikan kapal itu yakni pihak asing, misalnya, dengan sendirinya menyangkut hubungan antarnegara. Di sisi lain, penangkapan kapal asing itu dapat dihubungkan dengan martabat Indonesia.

"Jadi, persoalannya bukan masalah ekonomi belaka, tetapi banyak hal yang tidak mustahil merupakan sesuatu yang sensitif. Jadi, kita harus hati-hati dan mampu membentangkan bukti-bukti kuat. Kalau tidak, kita juga yang susah di belakang hari," kata Jalius.

Menanggapi keluhan pihak perusahaan pemilik kapal, yang menyanggah sikap aparat yang begitu saja menangkap dan menahan ketujuh kapal meskipun memiliki dokumen lengkap, Pangarmabar Djoko Sumaryono menegaskan, TNI AL hanya melakukan tugas menindak pelanggaran pelayaran sesuai kewenangan mereka. Ia membantah adanya intervensi dari pihak mana pun selama pemeriksaan berlangsung. (TI/WAS)